

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Aksa Sukses, Jakarta, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Hamzah, Andi, *KUHP & KUHPA Cetakan ke 17*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, UGM, Yogyakarta, 1979.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Jabir Alfaruqi, *Nasionalisme Baru Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jateng, Semarang, 2008
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1993.
- Maleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Ramadhan, Apriyanto, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2019.
- Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1988.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Suseno, Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

C. JURNAL

- Susanti Ante, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*,
Lex Crimen Vol. II/No.2, April-Juni 2013, hlm. 100-101.
- Bandingkan dengan Johan Wahyudi, "*Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti
Pada Pembuktian Di Pengadilan*", *Perspektif* Vol. XVII, no. 2 (2012).
Hlm. 123.
- Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara
Pidana*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, November 2017
: 463-486, hlm. 471.

D. INTERNET

Ini Kode-Kode Obrolan Whatsapp Dalam Dugaan Suap Pejabat Pajak
diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/857933/ini-kode-kode-obrolan-whatsapp-dalam-dugaan-suap-pejabat-pajak/full&view=ok>, pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 21.20

Modul Materi Tindak Pidana Korupsi, diakses dari
<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf> pada tanggal 16 Desember 2020 pukul
21:04